



PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MASYARAKAT MAJEMUK

Idrus L

Institut Agama Islam Negeri Bone

* Korespondensi penulis. Email: idrusratif.iainbone@gmail.com

Abstract

This research aims to explain the position of Islamic Religious Education in today's pluralistic society which is full of the emergence of conflicts both racial and religious. This research is descriptive analytical in nature by collecting relevant books and journals and then analyzing them using a qualitative descriptive approach. The research results show that Islamic religious education in a pluralistic society will be implemented in educational institutions with a strong commitment to their respective religions but still interacting with various religions, remaining open, learning and respecting dialogue partners. This research is expected to strengthen the position of Islamic religious education in strengthening religious tolerance and moderation.

Keywords: Education, Pluralism, Islam

I. PENDAHULUAN

Kemajemukan dalam beragama saat ini tampaknya kian menjadi masalah penting di Indonesia. Di beberapa tempat, penulis menemukan indikasi-indikasi terjadinya konflik dan ketegangan antar agama. Prasangka, ejekan, dan diskriminasi berkembang dengan mengangkat isu-isu sara. Komunikasi sosial menjadi sulit lantaran agama.¹

¹ Agama dan kebudayaan senantiasa menjadi pergulatan dan mengisahkan problem tersendiri. Di satu sisi agama diasumsikan sebagai sesuatu yang bersifat ilahiah

Masyarakat cenderung sektarian. Pendidikan keagamaan yang semula diharapkan dan dibanggakan sebagai kekuatan integratif tapi dalam banyak hal, telah menjadi kekuatan disintegratif. Keadaan ini tentu saja didorong oleh beberapa faktor. Faktor utama adalah politisasi agama baik oleh Negara maupun elite keagamaan dan trend modernisasi. Untuk mempertahankan dominasi, Negara seringkali menggunakan legitimasi agama dan atau menjalankan politik segregasi agama-agama. Taktik yang sama dijalankan oleh para politisi atau agamawan yang memakai jubah agama untuk tujuan-tujuan politik.²

Perkembangan pendidikan dan modernisasi membuat daya dan persaingan hidup semakin tinggi, kompetitif dan cepat. Komunikasi dan hubungan sosial semakin intensif. Disatu sisi persaingan dalam bidang pendidikan, ekonomi dan politik mendorong orang-orang untuk kembali ke dalam agama, disisi lain agama menjadi tempat pelarian dan dijadikan peluru perlawanan. Hal yang pertama memunculkan masyarakat yang pandangannya dikuasai oleh kondisi sebelumnya (deterministik) dan takluk pada dominasi.³ Hal kedua mendorong seseorang ke jalur

karenanya harus mengatasi segala hal, termasuk kebudayaan manusia, kebudayaan diposisikan tunduk terhadap agama. Namun di sisi lain, kebudayaan merupakan bagian dari kehidupan manusia sehingga sulit untuk dipisahkan. Dalam konteks ini keberadaannya harus tunduk di bawah agama. Islam sebagai agama seharusnya membuka diri terhadap fenomena-fenomena yang melingkupinya, olehnya itu pemikir-pemikir muslim harus berupaya menjadikan Islam sebagai agama yang dilaksanakan sesuai dengan akar budaya nusantara sendiri dan bukannya berasal dari luar. Kalau saat ini ada kecenderungan untuk menyingkirkan kebudayaan atas nama penegakan ajaran Islam hal itu karena agama telah dipahami secara keliru, padahal Islam datang untuk mengakomodasi budaya yang baik dari masyarakat setempat. Lihat. Qasim Mathar, "Islam dan Penghargaan Budaya Lokal", Boghel dkk (ed), *Paseng to Rilino Menanti Keterlibatan Penuh Kreatif Agama*, (Makassar: LAPAR, 2003) h. 39-44.

²Lihat, Hairus Salim Hs, "Belajar Bersama Sekelumit Pluralisme Sekelumit Pengalaman: Sebuah Pengantar", *Makalah pada acara diskusi Lembaga Advokasi Pendidikan Anak Rakyat "LAPAR"*, (Makassar, 26-28 Agustus 2003), h. 2.

³Lihat, William F. O'neil, *Educational Ideologies*, diterjemahkan oleh Omi Intang Naomi, *Ideologi-Ideologi Pendidikan*, (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 412.

ketegangan dan konflik yakni adanya pandangan bahwa permasalahan bersumber dari perbedaan suku, agama dan golongan. Watak sektarian dan segregatif dari masyarakat ini memuluskan jalannya hegemoni kekuasaan dan diskriminasi pendidikan. Jelaslah, terhadap perubahan ini, kalangan tenaga pendidik agama tidak mempunyai dasar-dasar yang kokoh, yang memungkinkan membangun landasan, baik formal maupun informal, yang baru bagi tempat dan kehidupan agama-agama.

Di sisi lain perkembangan ini juga diikuti dengan semangat kebangkitan agama yang besar. Sebagian merupakan anti-tesis dari perkembangan modernitas, maka dengan demikian terjadi suatu tabrakan kultural. Di satu sisi, terdapat kekuatan perubahan yang memaksa orang untuk keluar dari pandangan dunia tradisional dan mengalakkan pendidikan modern, tetapi di sisi lain, terdapat dorongan untuk menahan, bahkan menariknya masuk kembali pada pandangan dunia tradisional.⁴

Dalam era globalisasi menurut Sumartana, dalam sebuah tulisannya, *Spiritualitas Agama di Tengah Pluralitas Peradaban Masyarakat Modern*, kesadaran akan identitas pribadi maupun persekutuan semakin menonjol.⁵ Pernyataan ini agaknya memiliki evidensi yang kuat terutama dalam hubungannya dengan peran pendidikan agama saat ini yang semakin bergairah membangun kembali institusinya dalam memberikan pemenuhan terhadap kebutuhan tersebut. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan untuk mengaktualisasikan identitas individu atau kelompok di tengah kemajemukan masyarakat,

⁴Lihat *ibid.*, h. 3.

⁵Sumartana, "Spiritualitas Agama di Tengah Pluralitas Peradaban Masyarakat Modern: Sebuah Pengantar", *Makalah pada acara diskusi Panel Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia "PMII" Metro Makassar*, (Makassar : Hotel Clebes, 2003), h. 1.

setiap agama memiliki ekspresi simbolik yang berbeda-beda sehingga juga akan melahirkan komunitas keagamaan yang berbeda pula.⁶

Keragaman dalam memahami dan mengaktualisasikan identitas pendidikan itulah yang akan melahirkan pluralisme atau kemajemukan. Kesadaran tentang pluralisme ini akan melahirkan paradoks yang menonjol dalam proses globalisasi; sebab, ketika dunia semakin menyatu, maka semakin majemuk pula bentuk-bentuk ekspresinya. Dengan kata lain, kemajemukan menuntut untuk diakui dan diberi tempat dalam kehidupan bermasyarakat terutama pada sektor pendidikan. Dikatakan demikian, karena bagaimanapun pluralisme merupakan kenyataan sosiologis yang tidak dapat dihindari. Ia merupakan bagian dari fitrah, sebagai kenyataan yang telah menjadi kehendak Tuhan.⁷ Sementara itu, sikap Islam terhadap kemajemukan sangat jelas. Islam tidak menolak adanya pluralisme, bahkan Islam memberikan kerangka sikap etis dan positif yang tercermin dari beberapa ayat al-Qur'an yang secara eksplisit mengakui kenyataan tersebut. Seperti dalam surat al-Hujurat ayat 13, al-Rum ayat 22 dan al-Maidah ayat 48.

Kesadaran akan pentingnya membangun keragaman identitas dalam bingkai pluralisme telah nampak dalam berbagai penelitian, penulis menemukan adanya trend peningkatan akan pentingnya pendidikan pluralisme yang menekankan pentingnya mempelajari dan memahami budaya dan agama yang berbeda. Melalui pemahaman yang mendalam, masyarakat dapat mengatasi stereotip, prasangka, dan

⁶Lihat Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Cet. II; Jakarta: Yayasan Wakaf Para Madinah, 1992), h. xvii.

⁷Lihat Nasaruddin Razak, *Dienul Islam*, (Cet. I; Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), h. 35

ketakutan yang mungkin muncul akibat ketidaktahuan.⁸ Pendidikan agama Islam perlu segera menampilkan ajaran-ajaran Islam yang toleran melalui kurikulum pendidikannya dengan tujuan dan menitikberatkan pada pemahaman dan upaya untuk bisa hidup dalam konteks perbedaan agama dan budaya, baik secara individual maupun secara kelompok dan tidak terjebak pada primordialisme dan eksklusifisme kelompok agama dan budaya yang sempit.⁹ Berdasarkan uraian di atas, hal inilah yang mendasari, penulis tertarik membahas tentang posisi pendidikan agama Islam dalam masyarakat yang majemuk/heterogen.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pendidikan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu data yang diperoleh berupa pendapat, informasi dan perilaku dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih luas.¹⁰ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini yakni pendekatan sosiologis, dengan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi berupa buku-buku dan jurnal yang relevan dengan penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisa deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya di analisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan. Data tersebut kemudian di analisa secara interpretatif menggunakan teori kemudian ditarik simpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.¹¹

⁸Ratno Lukito, "Pendidikan Pluralisme" *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 9 No. 1 (2023), h. 3.

⁹Fathul Mubin, "Wawasan Pluralisme dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam" *Jurnal Didaktika*, Vol 7 No. 2 (2017), h. 32.

¹⁰Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), h. 34.

¹¹Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif, serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 78.

III. PEMBAHASAN

A. *Hakekat Pendidikan Agama Islam dalam Kemajemukan*

Membicarakan kemajemukan (pluralisme) pada awalnya adalah membicarakan kebhinekaan serta kebenaran agama-agama yang menjadi bagian dari diri dan kehidupan saat ini. Kemajemukan di Indonesia saat ini tampaknya kian menjadi masalah yang penting. Beberapa daerah di Indonesia sering terjadi konflik dan ketegangan antar agama¹². Prasangka, stereotipe, dan diskriminasi berkembang. Komunikasi sosial sulit lantaran perbedaan agama, budaya, dan ras. Masyarakat cenderung sektarian. Pendidikan agama yang semula diharapkan untuk memberikan pencerahan sebagai kekuatan integratif, dalam banyak hal, telah menjadi kekuatan disintegratif.¹³ Potret ini didasari karena kemajemukan Indonesia. Kata majemuk atau pluralisme berarti jamak atau banyak,¹⁴ Kata ini dalam bahasa Indonesia, menjadi berarti hal yang menyatakan jamak atau kebudayaan itu bukan hanya satu tetapi banyak ragamnya.¹⁵ Adapula yang memberi pengertian kemajemukan yaitu kejamakan (yang berdiri sendiri); suatu teori yang mengatakan bahwa

¹² Problem yang dihadapi oleh Agama-agama khususnya Islam semakin berkembang dan kompleks. Kemajuan IPTEK dan pembangunan serta derasnya arus globalisasi-misalnya-telah banyak mempengaruhi tingkah laku, sikap, dan cara berfikir manusia. Dan suatu hal yang perlu diperhatikan, bahwa seringkali eksekusi dari perubahan tersebut membawa dampak negatif, walaupun masih terdapat sisi positifnya. Dengan kondisi ini setidaknya ada lima biaya yang harus dibayar masyarakat, yaitu; *Pertama*, teknologi dan globalisasi telah menghilangkan keragaman dan menstandarisasi kehidupan. *Kedua*, teknologi dan globalisasi menyebabkan fragmentasi, spesialisasi, dan kuantifikasi. *Ketiga*, ia melahirkan *impersonality* (hilangnya rasa persaudaraan antara sesama manusia). *Keempat*, Lihat Ali Maschan Moesa, *NU, Agama, dan Demokrasi: Komitmen Muslim Tradisionalis Terhadap Nilai-Nilai Kebangsaan*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Dai Muda, 2002), h. 159.

¹³Lihat Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam Pluralisme Budaya dan Politik: Refleksi Teologi untuk Aksi dalam Keberagamaan dan Pendidikan*, (Cet. I; Yogyakarta: Sipsess, 1994), h. 8.

¹⁴ Lihat Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Cet. XXIII; Jakarta: PT. Gramedia, 1996), h. 435.

¹⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Pustaka Pelajar, 1989), h. 691.

realitas terdiri dari banyak subtansi.¹⁶ Sedangkan menurut Alwi Shihab pengertian kemajemukan dapat diasumsikan sebagai berikut;

Pertama, kemajemukan tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kebersamaan. Namun yang dimaksud adalah keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. Kemajemukan agama dan budaya dapat jumpai di lingkungan masyarakat baik di kantor, sekolah, bahkan di pasar sekalipun.

Kedua, kemajemukan harus dibedakan dengan kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme menunjuk kepada suatu realitas di mana aneka-ragam agama, ras, dan bangsa, hidup berdampingan di suatu lokasi. Ambil misal kota New York. Kota ini adalah kota kosmopolitan. Di kota ini terdapat orang Yahudi, Kristen, Muslim, Hindu, Budha, bahkan orang-orang yang tanpa agama sekalipun. Seakan seluruh penduduk dunia berada di kota ini, namun interaksi positif antara penduduk ini, khususnya di bidang agama sangat minimal, walaupun ada.

Ketiga, konsep kemajemukan tidak bisa disamakan dengan relativisme. Seorang relativis akan berasumsi bahwa hal-hal yang menyangkut "kebenaran" atau "nilai" ditentukan oleh pandangan hidup serta kerangka berpikir seseorang atau masyarakatnya. Sebagai contoh. "kepercayaan/kebenaran" yang diyakini oleh bangsa Eropa bahwa "Columbus menemukan Amerika" adalah sama benarnya dengan "kepercayaan/kebenaran" penduduk asli benua tersebut yang menyatakan bahwa "Columbus mencaplok Amerika".¹⁷ Sebagai konsekwensi dari paham relativisme agama, doktrin agama apapun harus

¹⁶Lihat Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barr³, *Kamus Ilmiah Populer*, (Cet. I; Surabaya: Arkola, 2001), h. 604.

¹⁷Lihat Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, (Cet. IV; Bandung: Mizan, 1998), h. 41-42.

dinyatakan benar. Atau tegasnya "semua agama adalah sama", karena kebenaran agama-agama, walupun berbeda-beda dan bertentangan dengan satu dengan yang lainnya, tetap harus diterima. Untuk itu seorang relativis tidak akan mengenal, apalagi menerima, suatu kebenaran universal yang berlaku untuk semua dan sepanjang masa.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kemajemukan terdapat unsur relativisme, yakni unsur tidak mengklaim pemilikan tunggal (monopoli) atas suatu kebenaran, apalagi memaksakan kebenaran tersebut kepada pihak lain. Paling tidak, seorang tokoh pendidikan akan menghindari sikap absolutisme yang menonjolkan keunggulannya terhadap pihak lain. Oleh karena itu, beberapa orang enggan menggunakan kata kemajemukan, karena khawatir akan terperangkap dalam lingkaran konsep relativisme.¹⁸ Konsep ini menerangkan bahwa apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, adalah relatif, tergantung kepada pendapat tiap individu, keadaan setempat, atau institusi sosial, pendidikan dan agama. Oleh karena itu, konsep ini tidak mengenal kebenaran absolut atau kebenaran abadi.¹⁹

Keempat kemajemukan bukanlah *sinkretisme*, yakni menciptakan suatu agama baru dengan memadukan unsur tertentu atau sebagian komponen ajaran dari beberapa agama untuk dijadikan bagian integral dari agama baru tersebut.²⁰ Yang perlu digaris bawahi di sini adalah, apabila konsep kemajemukan di atas hendak diterapkan pada lembaga pendidikan di Indonesia, maka ia harus bersyaratkan satu hal, yaitu komitmen yang kokoh terhadap agama masing-masing. Seorang

¹⁸Lihat *ibid.*, h. 42.

¹⁹Lihat Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales sampai James*, (Cet. IV; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994), h. 44.

²⁰Lihat Alwi Shihab, *op. cit.*, h. 42.

guru, dalam berinteraksi dengan aneka-ragam agama, tidak saja dituntut untuk membuka diri, belajar, dan menghormati mitra dialognya. Tetapi yang terpenting ia harus komitmen terhadap agama yang dianutnya. Hanya dengan sikap demikian dapat menghindari relativisme pendidikan agama yang tidak sejalan dengan semangat *Bhineka Tunggal Ika*.

Kemajemukan yang dimaksudkan penulis adalah paham yang mempercayai adanya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat yang meliputi perbedaan agama, ras, kelompok, suku, budaya, dan adat istiadat. Jadi pengertian tentang pendidikan Agama Islam dalam masyarakat majemuk adalah suatu sistem pendidikan yang memahami adanya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat yang meliputi perbedaan agama, ras, kelompok, suku, budaya, dan adat istiadat.

B. Kemajemukan dalam Perspektif Pendidikan Islam

Kemajemukan dan pluralisme khususnya di Asia Tenggara bukan merupakan fenomena baru. Malah sebelum abad 19, daerah ini terkenal sebagai daerah yang majemuk dalam diskusi-diskusi politik. Istilah *plural society*, seorang pengamat politik Inggris, menciptakan dan menerapkan istilah kemajemukan dan pluralisme itu untuk Asia Tenggara, terutama negara Malaysia, Burma dan Indonesia karena dianggap sangat majemuk dibandingkan dengan negara-negara Barat dan Indonesia sendiri sebagai *locus classicus*, tempat klasik dari pluralism yang mewarnai tradisi politik dan praktek keagamaan orang muslim.²¹

Indonesia adalah salah satu bangsa paling plural di dunia dengan 1700 pulau yang ada di wilayahnya, baik besar maupun kecil, baik dihuni

²¹Lihat Robert W. Hefner, *Pluralisme di Indonesia*, dalam buku Ahmad Suaedy, *Pergulatan Pesantren Demokrasi*, (Cet. I; Yogyakarta: LkiS, 2000), h. 169

maupun tidak. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dan negara dengan latar belakang paling beragam. Dengan sekitar 300 kelompok etnis suku bangsa di Indonesia, atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2022 dan bahasa yang ada di bawah naungannya, Indonesia juga sebuah negara dengan kebudayaan yang sangat beragam. Dalam era globalisasi masa kini, umat beragama di hadapkan kepada serangkaian tantangan baru yang tidak terlalu berbeda dengan apa yang pernah dialami sebelumnya. Pluralisme agama dan konflik intern antara agama di Indonesia adalah fenomena nyata. Di masa lampau kehidupan keagamaan relatif lebih tentram dengan umat beragama bagaikan kamp-kamp yang terisolasi dari tantangan dunia luar.²² Kemajemukan umat di sini, bukan kelemahan melainkan justru salah satu kekayaan, karena kemajemukan sebetulnya memberikan latihan sosial kepada umat Islam sejak dahulu terhadap mereka sendiri dan terhadap orang non-Muslim.

Di dalam al-Qur'an ditemukan rekaman kontak Islam dengan komunitas-komunitas agama yang ada. Sejak kelahirannya, Islam sudah berada di tengah-tengah budaya dan agama-agama lain. Nabi Muhammad Saw. ketika menyiarkan agama Islam sudah mengenal beberapa agama semisal Yahudi dan Kristen. Perdagangan yang dilakukan bangsa Arab pada waktu itu ke Syam, Irak, Yaman, dan Etiophia, dan posisi kota Mekah sebagai sentral perdagangan yang menghubungkan daerah-daerah di sekeliling Jazirah Arab membuat budaya Bizantium, Persia, Mesir, dan Etiophia, menjadikan agama-agama yang ada di wilayah Timur Tengah dan sekitarnya, tidak asing

²²Lihat Nurcholis Majid, *Mencari Akar-akar Islam bagi Pluralisme Modern; Pengalaman Indonesia, dalam Jalan Baru Islam*, (Cet. I, Bandung: Mizan, 1998), h. 91.

lagi bagi Nabi Muhammad Saw. dan orang-orang Arab yang hidup sezaman.

Sikap permusuhan dan polemis terhadap komunitas-komunitas agama lain itu sudah ada dalam al-Qur'an. Demikian pula sikap netral dan apresiatif, lalu apa yang dibicarakan? Realitas kemajemukan bisa sama, tetapi perbedaan latar belakang dan sikap orang terhadap kemajemukan itu tidak dapat diingkari. Kaum muslimin dahulu menyiarkan Islam baik pala pendidikan formal maupun non formal dengan keyakinan penuh bahwa pendidikan agama mampu memberikan pencerahan terhadap fenomena kemajemukan, dan hubungan antar bangsa, agama, budaya, dan sebagainya. lebih banyak diwarnai kekerasan dan tindakan "saling menghancurkan", maka di dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang mengisyaratkan bahwa pendidikan Islam dalam konteks masyarakat majemuk merupakan sesuatu yang alamiah.²³ Allah tidak menghendaki manusia untuk menjadi satu umat saja. Allah berfirman:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
وَلَنَسْأَلَنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kalian satu umat saja, tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan (QS. Al-Nahl/16: 93).

²³Lihat Robert W. Hefner, *op. cit.*, h. 188.

Ayat di atas menurut menurut Wahbah Suhaili dalam kitabnya bahwa perbedaan antara satu umat dengan umat yang lain adalah fitrah dan merupakan tabiat manusia, dan tidaklah sulit bagi Allah untuk menyatukan seluruh manusia dalam satu agama dan komunitas, Tetapi Allah tidak melakukan hal tersebut sebab Ia telah mentakdirkan bahwa pikiran manusia itu tidak sama ada yang sesat dan ada yang mendapat petunjuk, perbedaan tersebut membuat mereka untuk mencari keselarasan hukum, dan pilihan untuk berbuat baik. Demikian terus menerus, sehingga dalam kehidupan itu manusia menentukan kapabilitas dalam beramal. Tetapi janganlah karena perbedaan pandangan membuat kamu saling membenci dan bermusuhan tetapi jadikanlah perbedaan itu sebagai jalan untuk menciptakan perdamaian dan mencari solusi bersama.²⁴

Menurut penulis bahwa masing-masing kelompok manusia mempunyai jalan hidup yang memang cocok untuk mereka. Perbedaan itu sesuatu yang alamiah dan karenanya penting agar masing-masing kelompok dapat berbuat untuk kebaikan umat manusia. Dalam QS. Al-Maidah/ 5: 48 ayat ini disebutkan, perbedaan tidak dapat diperdebatkan sekarang, yakni pada saat orang tidak sanggup untuk keluar atau melepaskan diri dari apa yang diyakininya sebagai kebenaran. Allah-lah nanti yang akan menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Sikap yang seharusnya diambil sekarang adalah membiarkan masing-masing orang berbuat menurut apa yang diyakininya sebagai kebenaran. Ayat ini pula merupakan penegasan gamblang yang menyokong

²⁴Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir f³ al-'Aqidah wa al-Syari'ah wal Manahij, juz. XIII* (Bairut: Dar al-fikr, t. tp), h. 211-222.

kemajemukan dalam pendidikan dan hukum yang sementara ini banyak diabaikan.

Selanjutnya dasar-dasar sosiologis kultural. Dasar ini juga mesti dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam. Kaitan antara pendidikan dengan masyarakat cukup luas. Sekolah berdiri di tengah-tengah masyarakat. Peserta didik berasal dari masyarakat. Pada saatnya lulusan pendidikan akan kembali kemasyarakat dan dipakai di masyarakat karena itu, kualitas lulusan pendidikan tersebut sangat berpengaruh terhadap maju mundurnya masyarakat di mana mereka bersosialisasi karena makna penting tersebut, masyarakat yang telah maju, turut aktif memberikan kontribusi dalam pengembangan pendidikan agama di lingkungannya. Hal itu juga karena berkaitan dengan masyarakat itu sendiri ke depan. Jadi, jelas ada korelasi antara pendidikan dengan masyarakat atau kondisi sosiologis kultural.²⁵

Bila pengembangan pendidikan keagamaan diikatkan dengan kondisi-kondisi sosial kultural suatu masyarakat, maka pendidikan atau lembaga sekolah dapat berfungsi sebagai pemeliharaan dan transformator kebudayaan. Di sini guru memegang peranan penting untuk menyerap kebudayaan masyarakat tersebut, kemudian mewariskannya kepada anak didik. Lebih jauh lagi sekolah dapat berfungsi untuk mengembangkan kebudayaan masyarakat, terutama yang menyangkut perbaikan nilai yang mendasari kebudayaan tersebut. Termasuk pula penyempurnaan atau perombakan tradisi yang menghalangi kemajuan dan kemaslahatan masyarakat tersebut. Hal ini

²⁵Lihat A. Mukti Ali, *Beberapa Persoalan Pendidikan Agama Dewasa Ini*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), h. 10-11.

dapat dilakukan melalui pengembangan pendidikan agama pada sekolah. Namun, di sini pula guru atau pendidiklah yang paling menentukan untuk memainkan peran tersebut. Bila ini dapat dilakukan, di sinilah terjadi apa yang disebut *social reconstruction*. Pendidikan adalah alat yang paling ampuh untuk melaksanakan proses pembentukan kembali masyarakat, ke arah yang lebih baik, maju, dan modern.²⁶

Pengembangan pendidikan agama Islam tampaknya tidak dapat ditangani secara parsial atau setengah-setengah, tetapi memerlukan pemikiran pengembangan yang utuh sebagai konsekuensi dari identitasnya sebagai lembaga pendidikan yang berciri khas keagamaan, terutama ketika dihadapkan pada kebijakan pembangunan nasional bidang pendidikan yang menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurut Wardiman Joyonegoro, manusia yang berkualitas itu setidaknya-tidaknya mempunyai dua kompetensi, yaitu kompetensi bidang IMTAQ (iman dan taqwa) dan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi).²⁷

Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa pada periode H.A. Mukti Ali (mantan Menteri Agama RI) ia menawarkan konsep alternatif pengembangan madrasah melalui kebijakan SKB 3 menteri, yang berusaha mensejajarkan kualitas madrasah dengan non madrasah, dengan posisi kurikulum 70% umum dan 30% agama. Pada periode menteri agama Munawir Sadzali menawarkan konsep madrasah aliyah program khusus (MAPK) dan pada periode menteri agama RI H. Tarmizi

²⁶*Ibid.*

²⁷Lihat Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam* (Cet. I; Surabaya: Pusat Studi Agama, Politik, dan Masyarakat, 2003), h. 175.

Taher menawarkan konsep madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas agama Islam, yang sedang berjalan hingga sekarang.

Dilihat dari *issue* sentralnya, Mukti Ali rupanya ingin mendobrak pemahaman masyarakat yang bernada sumbang terhadap eksistensi madrasah, di mana ia selalu didudukkan dalam posisi marginal, karena ia hanya berkuat pada kajian keagamaan dan miskin pengetahuan umum, sehingga *out put*-nya pun kurang diperhatikan oleh masyarakat. Bahkan kajian-kajian keagamaannya pun cenderung individualistik primordialisme pada satu mazhab atau golongan dan tidak menerima kebenaran lain. Sehingga *out put*-nya pun kurang menghargai pluralitas. Dengan munculnya SKB 3 Menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri) pada tahun 1975 tentang "peningkatan mutu pendidikan pada madrasah" rupanya masyarakat mulai memahami eksistensi madrasah dalam konteks pendidikan nasional.²⁸ Jika dipandang dari kedudukan normatif-filosofis dan sosio-historis pendidikan agama, pertanyaan semacam itu merupakan hal yang wajar saja.

²⁸Adapun aturan yang menjadi latar belakang yaitu di dalam bab II pasal 2 dinyatakan bahwa: (1) ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat; (2) lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas; dan (3) 30 siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat). Mungkin esensi dari SK tersebut belum banyak ditangkap dan dipahami oleh para pembina dan pengelola madrasah itu sendiri. Porsi 70% pengetahuan Umum dan 30% pengetahuan agama rupanya dipahami secara simbolik-kuantitatif dan bukan substansial-kualitatif, sehingga lagi-lagi outputnya menjadi mandul, penguasaan pengetahuan umum masih dangkal dan pengetahuan agamanya pun tidak jauh berbeda. Sebagai akibat dari kemandulan keilmuan yang dimiliki output madrasah, maka menteri agama Tarmidzi Taher mencoba menawarkan kebijakan "Madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas agama Islam" yang muatan kurikulumnya sama dengan sekolah non madrasah. Agar tawaran ini tidak dipahami secara simbolik, maka perlu ditelaah apa substansi dari kebijakan ini, dan bagaimana implikasinya terhadap pengembangan lembaga pendidikan tinggi di masa depan. Lihat *Ibid.*, h. 179.

Pertama, pendidikan agama pada dasarnya merupakan instrumen strategis bagi pengembangan potensi dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Potensi ini di antaranya adalah potensi moral. Potensi moral inilah yang menjadikan manusia secara esensial dan eksistensial sebagai makhluk religius. Meskipun keadaan ini merupakan sesuatu yang alami bagi manusia, ia tetap membutuhkan pengembangan melalui proses kebudayaan yang instrumen pokoknya adalah pendidikan karena ini lebih banyak berkaitan dengan moral, maka pendidikan agama mempunyai tanggung jawab secara formal.

Kedua, pendidikan termasuk pula pendidikan agama, tidak diadakan dalam ruang dan hampa. Tetapi selalu berhadapan dengan proses dinamis kehidupan masyarakat. Apa implikasi keadaan ini terhadap pendidikan? Agar pendidikan tetap memperlihatkan signifikansinya, maka pendidikan perlu membuat suatu pemikiran proyektif dan antisipatif tentang kecenderungan besar yang akan terjadi di masa yang akan datang. Hasil proyeksi dan antisipasi ini penting sebagai kerangka acuan untuk mengadakan kajian ulang terhadap keberadaan dan kebermaknaan pendidikan selama ini, dan bagaimana mengorientasikan pendidikan sesuai dengan realitas masyarakat pada masa yang akan datang.²⁹ Dipandang dari kedua perspektif di atas itulah, pendidikan agama dinilai sedang berada pada posisi kritis, karena fungsi pokoknya yang berkaitan dengan pengembangan moral masih jauh dari harapan. Sementara itu pula pendidikan agama Islam dinilai tertinggal dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

²⁹ Syamsul Arifin, *Merambah Jalan Baru dalam Beragama Rekonstruksi Kearifan Prenial Agama dalam Masyarakat Madani dan Pluralitas Bangsa* (Cet. I; Yogyakarta: Ittaqa Press, 2000), h. 204-205.

Esensi perubahan, terdapat tiga kerangka teoritik yang sering digunakan dalam ilmu-ilmu sosial untuk menjelaskan secara substantif terjadinya perubahan dalam masyarakat. *Pertama*, teori yang memandang perubahan sebagai suatu proses deferensiasi dan integrasi. Termasuk dalam kelompok ini, misalnya teori evolusi dan non evolusi yang ingin menunjukkan bahwa perkembangan masyarakat berlangsung secara terus-menerus melalui tahapan-tahapan tertentu sebagaimana halnya pertumbuhan dan perkembangan biologis. *Kedua*, teori sosial yang memandang perubahan dan perkembangan masyarakat sebagai penyebab terjadinya perubahan, yakni nilai-nilai yang dimiliki masyarakat dan *ketiga*, teori yang banyak dianut oleh para intelektual di negara yang sedang berkembang, yakni teori yang beranggapan bahwa perubahan dan perkembangan masyarakat merupakan proses pembebasan dari ketergantungan.³⁰

Di antara ketiga teori di atas yang menarik adalah teori yang kedua, yang menekankan aspek tata nilai dalam proses perubahan. Masalah nilai ini penting diperhatikan mengingat kedudukannya yang sangat sentral dalam masyarakat. Dalam studi antropologis, sistem nilai dipandang sebagai pedoman tertinggi dari seluruh artikulasi perilaku manusia. Seluruh sistem tata kelakuan manusia yang tingkatannya lebih konkret, semuanya berderivasi dari sistem nilai itu.

Setiap masyarakat, terlepas dari perbedaan stratifikasinya pasti mempunyai tata nilai yang berpengaruh sangat besar dalam kehidupan seseorang secara personal, dan mengikat secara integratif bagi seluruh anggota komunitas. Dengan kesatuan sistem nilai tersebut, tentu

³⁰Lihat *Ibid.*, h. 205.

komunitas dapat disatukan dan cenderung mempunyai ikatan solidaritas dan rasa identitas bersama yang kokoh. Akibatnya, jika salah satu anggota masyarakat melakukan tindakan pelecehan terhadap tata nilai yang telah disepakati bersama, ia akan diberi sangsi moral. Ini bisa dilihat pada masyarakat dengan sistem kekerabatan.

Disebabkan karena kedudukan tata nilai tersebut tidaklah berdiri sendiri, tapi sebagai bagian dari kebudayaan, tata nilai yang diperoleh lewat pendidikan dijadikan sebagai kerangka acuan oleh masyarakat akan terus mengalami perkembangan sejalan dengan terjadinya perubahan sosial atau kebudayaan karena itu jika dilihat dari perspektif pendidikan dan kebudayaan, sulit ditemukan adanya tata nilai yang tidak disentuh sama sekali oleh perubahan. Tidak terlalu mengherankan, bila dalam masyarakat seperti masyarakat modern sekarang ini, dijumpai adanya pergeseran nilai yang begitu cepat sekali dari nilai-nilai lama (tradisional) ke nilai-nilai baru yang dianggap kondusif, sebagai kerangka acuan dalam menghadapi kehidupan baru di masa depan.³¹

Olehnya itu, perlu digunakan perspektif pendidikan dan kebudayaan dalam menganalisis lebih lanjut persoalan di atas. Menurut Alport, Verson dan Lendsey seperti dikutip Jujun S. Sumantri, dalam pendidikan dan kebudayaan terdapat enam nilai dasar yakni nilai teori, ekonomi, estetika, sosial, politik, dan agama. Adapun nilai strategis pendidikan agama masih menjadi kontroversi karena masih terdapatnya sudut pandang yang berbeda. Dalam membicarakan perang agama, masih terdapat pemikiran Conte yang terkenal dengan paradigma

³¹Lihat *Ibid.*, 206.

pemikiran positivisme.³² Pemikiran Conte ini bercorak *linier* dalam memandang perubahan dan pesimistik dalam memandang agama.

Harus diakui bahwa manusia sekarang ini telah sampai kepada kemajuan IPTEK. Kemajuan ini tidak saja membawa manusia pada tingkat progresivitas yang tinggi. Tetapi IPTEK juga telah berkembang menjadi suatu kosmologi baru yang menjadi tantangan agama. Berdasar keadaan obyektif inilah, orang berbicara tentang krisis agama atau masa depan agama yang suram karena kedudukannya digantikan oleh IPTEK. Tetapi apakah signifikan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menggantikan kedudukan agama secara absolut. Dalam arus perubahan yang berkembang secara global ini telah mempengaruhi dimensi religiusitas, nampaknya telah menjadi kesadaran bersama. Namun sepenuhnya mengatakan, bahwa yang akan menjadi *mainstream* dalam proses perubahan secara keseluruhan adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak dapat dibenarkan secara mutlak. Sebab bagaimana pun juga agama mempunyai kedudukan fundamental dan eksistensial dalam kehidupan manusia³³

Kalau dalam pendidikan nasional, pendidikan di arahkan untuk mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan

³² Filsafat positivisme itu adalah hal yang menyelidiki obyek sarannya didasarkan pada kemampuan akal, sedang hal-hal tidak dapat dijangkau oleh akal tidak akan dijadikan sasaran penyelidikan. Kedua, positif di artikan sebagai penafsiran sesuatu yang bermanfaat, hal ini sesuai dengan ajarannya yang menyatakan bahwa dalam filsafat positivisme, segala sesuatu harus di arahkan pada pencapaian kemajuan. Ketiga, sebagai lawan dari sesuatu yang diragukan, maka pengertian positif diartikan sebagai penafsiran sesuatu yang sudah positif. Keempat, sebagai lawan dari sesuatu yang kabur, maka pengertian positif di artikan sebagai penafsiran sesuatu yang jelas atau tepat. Kelima, sebagai lawan dari sesuatu yang negatif, maka pengertian positif dipergunakan untuk penunjukan sifat-sifat pandangan filsafatnya yang selalu menuju ke arah penataan dan penertiban. Lihat Koento Wibisino Siswomihardjo, *Arti Perkembangan Menurut Filsafat Positivisme Auguste Conte* (Cet. II; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), h. 37-38.

³³Lihat Syamsul Arifin, *op. cit.*, h. 210.

bertakwa, maka dalam konteks pendidikan Islam justru harus berusaha lebih dari itu. Dalam arti, pendidikan Islam bukan sekedar di arahkan untuk mengembangkan manusia yang beriman dan bertakwa, tetapi justru berusaha mengembangkan manusia untuk menjadi imam/pemimpin yang menghargai kemajemukan.

Profil orang-orang yang taat kepada agamanya adalah sebagai berikut:

1. Mereka senantiasa mempelajari al-Qur'an dan al-Sunnah, dan berusaha memahami ajaran Allah yang terkandung di dalamnya, serta berusaha menghayatinya.
2. Agar mereka dapat menghayati al-Qur'an dan sunnah, mereka harus memosisikan diri sebagai *actor* (pelaku) ajaran Islam, bukan hanya pemikir atau penalar, tetapi juga menjadi pemain yang setia (loyal), karena pada dasarnya agama Islam adalah bukan sekedar *intellectual exercise*, tetapi justru sebagai agama amal (*action*).
3. Mereka memiliki komitmen terhadap ajaran Islam.
4. Mereka siap berdedikasi dalam rangka mengembangkan ajaran Islam yang *rahmatan li al 'alamin*.³⁴

Karena itulah, profil orang-orang yang mengikuti aturan-aturan Allah adalah mereka yang memiliki kematangan akidah, kedalaman spritual, dan keunggulan moral (kesalehan individu dan kesalehan sosial), serta siap berjuang dan berdedikasi dalam menegakkan ajaran dan nilai-nilai Islam yang universal atau *rahmatan li al-'alamin*.

³⁴Lihat *Ibid.*, h. 50.

IV. KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan bahwa pendidikan agama Islam pada dasarnya merupakan instrumen strategis dalam masyarakat majemuk dalam membangun nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, kebangsaan. Seorang guru, dalam berinteraksi selalu membuka ruang dengan keanekaragam agama, tidak saja dituntut untuk membuka diri, belajar, dan menghormati mitra dialognya. Tetapi yang terpenting ia harus komitmen terhadap agama yang dianutnya. Hanya dengan sikap demikian dapat menghindari relativisme pendidikan agama yang tidak sejalan dengan semangat *Bhineka Tunggal Ika*. Penelitian ini diharapkan memberikan penguatan akan pentingnya posisi pendidikan agama Islam dalam menguatkan nilai-nilai kebangsaan yang kuat dalam mengatasi berbagai permasalahan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. Mukti. *Beberapa Persoalan Pendidikan Agama Dewasa Ini*. Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Arifin, Syamsul. *Merambah Jalan Baru dalam Beragama Rekonstruksi Kearifan Prenial Agama dalam Masyarakat Madani dan Pluralitas Bangsa*. Cet. I; Yogyakarta: Ittaqa Press, 2000.
- Arifin, Tobroni dan Syamsul. *Islam Pluralisme Budaya dan Politik: Refleksi Teologi untuk Aksi dalam Keberagamaan dan Pendidikan*. Cet. I; Yogyakarta: Sypress, 1994.
- Barri, Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al- *Kamus Ilmiah Populer*. Cet. I; Surabaya: Arkola, 2001.
- Dadang, Kahmad. *Pendekatan Sosiologis dalam Studi Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Hefner, Robert W. *Pluralisme di Indonesia*, dalam buku Ahmad Suaedy, *Pergulatan Pesantren Demokrasi*. Cet. I; Yogyakarta: LkiS, 2000.
-
-

- Huntingtong, Samuel P. *The Clas of Civilations and The Remaking of World Order* diterjemah oleh Sadat Ismail, *Benturan Antar Peradaban*. Cet. VI; Yogyakarta: CV. Qalam, 2003.
- Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*. Cet. XXIII; Jakarta: PT. Gramedia, 1996.
- Koento Wibisino Siswomihardjo, *Arti Perkembangan Menurut Filsafat Positivisme Auguste Conte*. Cet. II; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
- Madjid, Nurcholis *Islam Doktrin dan Peradaban*. Cet. II; Jakarta: Yayasan Wakaf Para Madinah, 1992.
- Majid, Nurcholis. *Mencari Akar-akar Islam bagi Pluralisme Modern; Pengalaman Indonesia, dalam Jalan Baru Islam*., Cet. I, Bandung: Mizan, 1998.
- Mathar, Qasim. "Islam dan Penghargaan Budaya Lokal", Boghel dkk (ed), *Pasang to Rilino Menanti Keterlibatan Penuh Kreatif Agama*. Makassar: LAPAR, 2003.
- Moesa, Ali Maschan. *NU, Agama, dan Demokrasi: Komitmen Muslim Tradisional Terhadap Nilai-Nilai Kebangsaan*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Dai Muda, 2002.
- Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*. Cet. I; Surabaya: Pusat Studi Agama, Politik dan Masyarakat, 2003.
- O'neil, William F. *Educational Ideologies*, diterjemahkan oleh Omi Intang Naomi, *Ideologi-Ideologi Pendidikan*. Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Pustaka Pelajar, 1989.
- Razak, Nasaruddin. *Dienul Islam*. Cet. I; Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986.
- Salim Hairus Hs. "Belajar Bersama Sekelumit Pluralisme Sekelumit Pengalaman: Sebuah Pengantar", *Makalah pada acara diskusi Lembaga Advokasi Pendidikan Anak Rakyat "LAPAR"*.
- Shihab, Alwi *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Cet. IV; Bandung: Mizan, 1998.
- Sumartana, "Spritualitas Agama di Tengah Pluralitas Peradaban Masyarakat Modern: Sebuah Pengantar", *Makalah pada*
-
-

acara diskusi Panel Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia "PMII" Metro Makassar. Makassar: Hotel Clebes, 2003.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.

Tafsir, Ahmad. *Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales sampai James* Cet. IV; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994.

Zuhaili, Wahbah. *al- Tafsir al-Munir f³ al-'Aqidah wa al-Syari'ah wal Manahij*, Juz.. XIII. Bairut: Dar al-fikr, t. tp.

